



Judul : Mahkamah Kehormatan Siap Periksa Setya Novanto
Tanggal : Minggu, 06 September 2015
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 1

POLITIK

Mahkamah Kehormatan Siap Periksa Setya Novanto

Ketua DPR dinilai melampaui kewenangan.

JAKARTA — Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat siap mengusut dugaan pelanggaran etika oleh Ketua DPR Setya Novanto, yang hadir dalam kampanye calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump. Mahkamah bisa bergerak atas dasar aduan atau kesepakatan bersama pimpinan.

“Berdasar undang-undang, harus ada aduan,” kata anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kemarin. Ia mengatakan, Mahkamah akan membahas persoalan etika Dewan ini dalam rapat Senin besok. Mereka akan melihat secara adil berdasarkan penjelasan dari anggota yang berangkat. “Pengusutan tanpa aduan bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan internal Mahkamah yang sifatnya kolektif kolegial.”

Setya dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon menghadiri kampanye calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, dalam rangkaian kunjungan kerja ke Amerika Serikat selama dua pekan sejak 31 Agustus lalu.

Politikus PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrat menganggap Mahkamah Kehormatan perlu memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh dua pemimpin Dewan itu. Rujukannya, Pasal 232 Kode Pedoman Etik Anggota Dewan, bahwa setiap anggota harus menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas selama menjalankan tugas.

PDI Perjuangan dan PKB, yang akan melaporkan Setya dan Fadli ke Mahkamah pada Senin besok, menganggap dua pemimpin DPR itu seharusnya berfokus pada agenda Forum Parlemen Sedunia. Apalagi bertemu dengan Trump tak ada dalam agenda.

“DPR adalah lambang kedaulatan yang merepresentasikan seluruh bangsa Indonesia, tapi hadir sebagai saksi dalam acara Donald Trump, yang bahkan bukan kepala negara,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, kemarin. “Ini masalah.”

Juru bicara Ketua Dewan, Nurul Arifin, mengatakan, pertemuan dengan Trump semula dalam rangka silaturahmi dan penguatan investasi di Indonesia. Mereka kemudian diajak melihat acara konferensi pers Trump. “Sebagai orang Timur yang memiliki kesantunan, ajakan tersebut dipenuhi,” kata Nurul. “Bukan sebagai bentuk dukungan politik.”

Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menganggap tindakan Setya itu melampaui kewenangan dan protokolernya sebagai Ketua DPR. “Beliau datang ke sana diperkenalkan sebagai Ketua DPR. Itu seolah-olah ada intervensi ke negara lain terkait dengan politik dalam negeri mereka,” katanya.

● INDRI MAULIDAR | DESTRIANITA K. | FRANCISCO ROSARIANS

PIMPINAN DEWAN DIANGGAP BOROSKAN ANGGARAN HALAMAN 2